

## BAB II

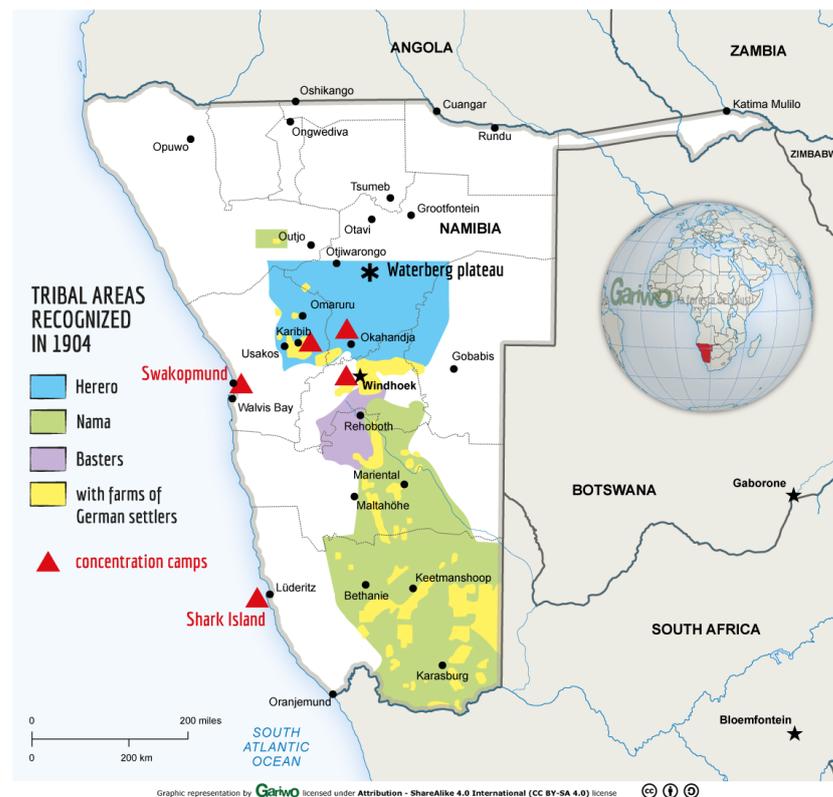
### RESPONS JERMAN DALAM GENOSIDA DI NAMIBIA

Kejahatan-kejahatan yang terjadi di era kolonialisme jarang menampakkan diri di panggung internasional, seolah-olah kekejaman masa tersebut terlupakan begitu saja (Schüring, 2004). Kasus genosida terhadap di Namibia yang terjadi antara tahun 1904 hingga 1908 di Namibia yang dahulu berada di bawah Pemerintah Kolonial Jerman (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017; Boehme, 2020). Pasca Universal Declaration on Human Rights 1948 barulah isu tentang kejahatan masa lampau seperti kejahatan genosida naik ke permukaan (Kössler, 2015). Meski demikian, *political apology* masih terbilang kontroversial sebab banyak sekali negara-negara yang dahulu memegang kekuasaan di era kolonialisme yang terlibat dalam tindak kejahatan seperti perbudakan, rasisme, bahkan genosida (Boehme, 2020).

Terlepas dari kompleksnya praktik *political apology*, Mihai dan Thaler (2014) berargumen bahwa *political apology* adalah kebijakan yang penting sebagai respons terhadap kejahatan yang terjadi di masa kolonial sebab *political apology* dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan bahwa negara tersebut kontra terhadap tindak kejahatan yang sempat diperbuat—yang dalam hal ini adalah genosida (Mihal & Thaler, 2014). Di dalam bab ini, penelitian ini akan berfokus pada penjelasan mengenai kasus genosida etnis Herero dan etnis Nama diikuti dengan respons Jerman terhadap kasus tersebut.

## 2.1 Kronologis Genosida di Namibia

Kejahatan genosida ini berawal dari praktik kolonialisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Jerman sejak 1884 di Namibia (Kössler, 2015). Pemerintah kolonial Jerman awalnya singgah di Kawasan permukiman masyarakat Herero dan Nama dan menempatkan pasukan militernya di kedua area tersebut (Kössler, 2015). Kemudian, seiring dengan pendudukan Jerman di kedua wilayah tersebut, terdapat praktik kerja paksa, penyitaan lahan, dan praktik-praktik kejam lainnya menciptakan kemarahan dari pihak masyarakat Namibia yang kemudian melakukan perlawanan terhadap pasukan Jerman (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017).



**Gambar 2.1** Peta Wilayah Namibia Tahun 1904

*Sumber: Gardens of Righteous Worldwide*

Pemberontakan etnis Herero dan etnis Nama kemudian direspons oleh Pemerintah Kolonial Jerman dengan mengirimkan pasukan perang di bawah pimpinan Jenderal Lothar von Trotha atau yang dikenal dengan *Schutztruppe* (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017; Shigwedha, 2016). Von Trotha kemudian mengeluarkan perintah untuk membunuh seluruh etnis Herero dan Nama yang berlangsung dari 1904 hingga 1908, baik dengan cara penembakan ataupun membiarkan mereka mati kelaparan dan dehidrasi (Kössler, 2015). Kedua kelompok etnis tersebut menjadi target genosida Pemerintah Kolonial Jerman sebab etnis Herero dan etnis Nama merupakan kelompok yang paling banyak melakukan perlawanan dan pemberontakan (Kössler, 2015).

Terdapat beberapa bentuk kejahatan genosida Jerman di Namibia antara tahun 1904 hingga 1908, yaitu aksi militer dengan tujuan memusnahkan kelompok etnis Herero dan Nama yang melawan kekuasaan kolonial Jerman (Kössler, 2015). Kemudian, pemerintah kolonial Jerman menempatkan etnis Herero dan Nama yang selamat di penampungan yang tidak didukung dengan sanitasi dan persediaan pokok yang menunjang (Kössler, 2015) sehingga kebanyakan dari masyarakat Herero dan Nama yang selamat pun pada akhirnya meninggal karena menderita kekurangan gizi dan kelelahan karena dipaksa bekerja tanpa istirahat yang cukup (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017).

Terdapat narasi dari penelitian Krisnhamurthy dan Tjiramanga (2020) dan Vilho Amukwaya Shigwedha (2016) bahwa korban genosida Herero dan

Nama yang selamat dari pembunuhan Pemerintah Kolonial Jerman bertahan hidup dengan memakan burung mentah sebab mereka terlalu takut untuk menyalakan api. Di tenda-tenda penampungan pun etnis Herero dan Nama yang selamat tidak diperlakukan secara manusiawi, para perempuan diperkosa dan dipaksa merebus tengkorak-tengkorak korban genosida lalu menguliti tengkorak-tengkorak tersebut yang pada akhirnya dikirim oleh Pemerintah Kolonial Jerman ke Jerman untuk dijual dan dipergunakan untuk eksperimen (Krishnamurthy & Tjiramanga, 2020; Shigwedha, 2016).

**Tabel 2.1 Bentuk Kejahatan Genosida Jerman di Namibia**

No.	Praktik Pelanggaran Hak Asasi Manusia Jerman di Namibia	Hukum Internasional yang Dilanggar
1.	Kejahatan genosida dengan korban sekitar 50.000 - 100.000 Herero dan 10.000 - 20.000 Nama	Statuta Roma artikel 6 & Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide
2.	Pemeriksaan	Statuta Roma artikel 7
3.	Penyiksaan	Statuta Roma artikel 7
4.	Kerja paksa	Statuta Roma artikel 7
5.	Perbudakan	Statuta Roma artikel 7
6.	Perdagangan tengkorak korban genosida	Statuta Roma artikel 6 & Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

*Sumber: diolah kembali dari Shigwedha, 2016.*

Serangkaian praktik genosida beserta kompleksitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Jerman di Namibia sesuai dengan tabel 2.1 kemudian diestimasikan memakan korban sekitar 50.000 hingga 100.000 Herero dan sekitar 10.000 hingga 20.000 Nama yang tentunya masuk ke dalam kategori kejahatan genosida (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017; Shigwedha, 2016; Sprenger, Rodriguez, & Kamaṭuka, 2017; Euronews, 2021). Kisaran angka tersebut setara dengan 80% masyarakat Herero dan 50% masyarakat Nama (European Center for Constitutional and Human Rights, 2020). Meski demikian, Jeremy Sarkin berargumen bahwa tanpa adanya pelaku asli dari kejahatan genosida, maka akan sulit dibuktikan tujuan murni dari kejahatan tersebut, sebab niat dibalik dilakukannya tindakan genosida hanya dapat diketahui langsung dari pencetus perintah genosida (Sarkin, 2009)—yang dalam hal ini adalah General Lothar von Trotha yang sudah meninggal.

Praktik kekejaman berupa *vernichtungsbefehl* atau perintah eksekusi yang dikeluarkan di Namibia yang berada di bawah pimpinan Jenderal Adrian Dietrich Lothar von Trotha tentunya telah melanggar hak asasi manusia berupa hak hidup (Shigwedha, 2016). Dan sebagai salah satu negara yang mengaksesi The Convention on the Prevention and Punishment on the Crime of Genocide sejak 1954, Jerman sejatinya memiliki tanggung jawab yang belum terselesaikan terkait kejahatan-kejahatan yang diperbuat di masa lampau (Gropengießer, 2005). Meski demikian, Kössler (2015) berargumen bahwa dari perspektif psikoanalisis, menghadapi masa lalu dengan berani dan

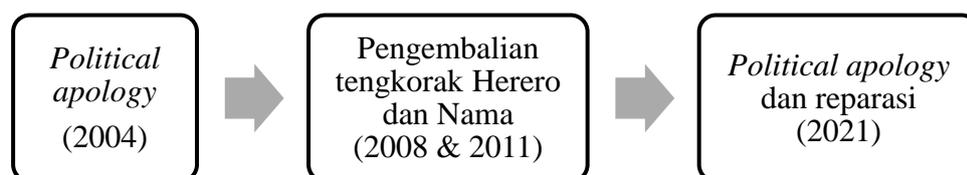
bijak dapat memberikan ketenangan walaupun yang melakukan tindak kejahatan adalah nenek moyang dari pihak Jerman yang sudah meninggal dan tidak dapat dijatuhi hukuman (Kössler, 2015).

Kejahatan genosida tentunya meninggalkan luka dengan beragam dampak negatif, baik terhadap pihak korban ataupun generasi berikutnya (European Center for Constitutional and Human Rights, 2019). Serangkaian bentuk kejahatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial Jerman sesuai dengan tabel 2.1 tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menghancurkan peradaban di sisi korban genosida, terlebih dengan dipergunakannya tengkorak-tengkorak korban secara manusiawi yang mengatasnamakan ilmu pengetahuan (Shigwedha, 2016). Praktik kejahatan genosida yang pernah terjadi kemudian membentuk susunan masyarakat yang rentan akan kesenjangan rasial diikuti dengan lemahnya perekonomian masyarakat, rendahnya taraf hidup serta kualitas pendidikan, bahkan hingga saat ini (Daase, Engert, Horelt, Renner, & Strassner, 2017).

Berdasarkan penelitian Nick Sprenger, Robert Rodriguez, dan Ngondi Kamaṭuka pada 2017 lalu, Kuaima Riruako—Kepala Etnis Herero—mengatakan bahwa tidak hanya genosida Herero menyebabkan kehilangan anggota keluarga dan mengalami kesulitan untuk bangkit kembali sebagai kelompok masyarakat, tetapi juga generasi muda yang berhasil selamat dari fenomena tragis tersebut memiliki kecemasan dan rasa takut yang tinggi akan masa depan sebab memiliki kisah gelap dari generasi sebelumnya (Sprenger, Rodriguez, & Kamaṭuka, 2017).

## 2.2 Respons Jerman terhadap Genosida di Namibia dari Waktu ke Waktu

Sejak bersatunya Jerman Barat dan Jerman Timur, Jerman berdiri menjadi satu negara yang kuat dan berani dalam menghadapi kekejaman masa lampau, hal ini ditandai dengan kompensasi Jerman yang penuh tanggung jawab kepada korban-korban Nazi (Kössler, 2015). Keberanian untuk bertanggung jawab tersebut kemudian membuka jalan bagi Pemerintah Jerman di era kontemporer untuk merekognisi dan menanggapi kekejaman-kekejaman masa lampau lainnya (Kössler, 2015).



**Gambar 2.2 Alur Respons Jerman terhadap Genosida di Namibia**

### 2.2.1 *Political Apology* Tahun 2004

Menteri Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, Heidemarie Wieczorek-Zeul pada kunjungannya ke Namibia menyampaikan simpatinya terhadap genosida Herero dan Nama pada 14 Agustus 2004 lalu ([www.namibia-botschaft.de](http://www.namibia-botschaft.de), 2004). Heidemarie Wieczorek-Zeul menyampaikan rasa bersalah dan komitmen untuk berbenah yang mana pada saat itu belum terdapat tekanan dari pihak manapun untuk Jerman merekognisi permasalahan tersebut, akan tetapi permintaan maaf resmi ini disampaikan oleh Heidemarie Wieczorek-Zeul (Engert, 2016).

*“We Germans accept our historical and moral responsibility and the guilt incurred by Germans at that time. And so, in the words of the Lord's Prayer that we share, I ask you to forgive us our trespasses.”* (Wieczorek-Zeul, 2004).

Permintaan maaf dalam pidato Heidemarie Wieczorek-Zeul pada 2004 berisikan rekognisi terhadap genosida Herero dan Nama oleh pemerintah Kolonial Jerman di bawah pimpinan Jenderal Lothar Von Trotha yang pada akhirnya menciptakan adanya penyesalan di pihak Jerman dan Heidemarie Wieczorek-Zeul menyatakan maaf atas nama negara Jerman yang telah berbuat kejam di era kolonialisme, akhir kata Wieczorek-Zeul menyampaikan harapan untuk dapat mencapai rekonsiliasi dengan pihak Namibia agar dapat merangkai masa depan yang lebih baik (Wieczorek-Zeul, 2004), untuk teks pidato resmi selengkapnya akan dicantumkan di lembar lampiran.

*Political apology* Jerman pada 2004 yang disampaikan oleh Heidemarie Wieczorek-Zeul menunjukkan mulai mudarnya amnesia terhadap kejahatan dan kekejaman masa kolonialisme dari pihak pemerintah Jerman, sebab belum banyak negara yang dulu memegang kekuasaan di era kolonial yang merekognisi kesalahan yang diperbuat di zaman kolonialisme, terlebih meminta maaf kepada negara yang sempat menjadi korban (Jones, 2015). Jerman kemudian secara perlahan bertransformasi menjadi donor terbesar bagi Namibia dari waktu ke waktu (Melber, 2015; Schüring, 2004).

Meski demikian, menurut Franziska Boehme (2020), permintaan maaf pada tahun 2004 ini tidak diikuti dengan aksi nyata berupa reparasi ataupun program lain yang setara. Oleh sebab itu, meskipun pidato Heidemarie Wieczorek-Zeul berhasil menyulut semangat rekonsiliasi Jerman dalam menanggapi kejahatan di masa lampau, permintaan maaf tersebut

memberikan impresi bahwa *political apology* tersebut hanyalah kalimat-kalimat belaka tanpa komitmen (Boehme, 2020).

Reinhart Kössler (2015) mengkritisi *political apology* 2004 bahwa pernyataan Heidemarie Wieczorek-Zeul masih terkesan ambigu sebab tidak ada gestur fisik yang menunjukkan penyesalan dan rasa bersalah mendalam, seperti halnya yang dilakukan oleh Willy Brandt yang berlutut di Ghetto Memorial, kota Warsawa pada tahun 1970 (Kössler, 2015).

### **2.2.2 Pengembalian Tengkorak Korban Genosida di Namibia**

Terlepas dari tulus atau tidaknya permintaan maaf pada tahun 2004, di tahun-tahun berikutnya, pemerintah Jerman dan Namibia melakukan negosiasi yang cukup intensif sejak tahun 2015 (European Center of Constitutional and Human Rights, 2021). Kemudian, pada tahun 2008, 2011, dan 2014, Pemerintah Jerman secara resmi mengembalikan tengkorak korban genosida Herero dan Nama ke Namibia (Kössler, 2015; Anstrett & Dreyfus, 2016).

Charité University Hospital pada tahun 2008 mengirim surat kepada Kedutaan Namibia atas ketersediaan institusi tersebut untuk mengembalikan tengkorak-tengkorak korban genosida di Namibia kepada negara asal (Shigwedha, 2016). Penyerahan tengkorak-tengkorak tersebut dihadiri oleh lima puluh empat representatif dari Namibia (Shigwedha, 2016).

Proses pengembalian tengkorak korban genosida ini kemudian terjadi lagi pada 3 Oktober 2011, di mana Charité University Hospital kembali menyerahkan tengkorak korban genosida kepada Namibia, terdapat 20 buah

tengkorak yang diidentifikasi sebagai tengkorak milik etnis Herero dan etnis Nama (Shigwedha, 2016). Minister of State Cornelia Piper menghadiri upacara penyerahan tengkorak tersebut dan memberikan pidato sebagai representatif dari pihak Jerman ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021). Cornelia Piper menyampaikan ungkapan bela sungkawa dan menyampaikan bahwa Jerman mengakui adanya beban moral yang harus ditanggung oleh Jerman sebagai konsekuensi dari kekejaman genosida di Namibia ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021). Cornelia Piper juga turut menyampaikan harapan akan tercapainya rekonsiliasi dalam relasi Jerman-Namibia ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021). Naskah pidato resmi selengkapnya tercantum di lampiran 2.

Pada 4 Oktober 2011, ratusan masyarakat Namibia menyambut kedatangan tengkorak-tengkorak nenek moyang mereka di Bandar Udara Hosea Kutako. Bagi masyarakat Namibia, tengkorak-tengkorak tersebut bukan sekadar sisa peradaban manusia, melainkan bukti perjuangan pahlawan Namibia yang di kemudian hari mengantarkan Namibia kepada kemerdekaan (Faber-Jonker, 2018).

Kembalinya tengkorak-tengkorak tersebut ke Namibia secara simbolik menggambarkan adanya kemauan dari pihak Jerman untuk mengambil tanggungjawab moral atas kasus genosida Herero dan Nama (Shigwedha, 2016). Meski demikian, Henning Melber berargumen bahwa dalam upaya rekonsiliasi dan negosiasi antara Jerman dan Namibia belum menunjukkan tanda-tanda perkembangan yang signifikan (Melber, 2020).

### 2.2.3 *Political Apology* dan Reparasi 2021

Sejak kembalinya tengkorak-tengkorak korban genosida di Namibia, isu genosida tersebut dibicarakan oleh Pemerintah Jerman dan Namibia mulai tahun 2015 dengan Zedekia Ngavirue sebagai representatif dari Namibia dan Ruprecht Polenz sebagai representatif Jerman (Melber, 2020; [www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021).

Setelah menyangang status Work In Progress, pada tahun 2021 Pemerintah Jerman di bawah kepemimpinan Kanselor Angela Merkel pada akhirnya mempublikasikan Press Release yang berisikan kesimpulan final dari dialog antara Jerman dan Namibia terkait genosida yang terjadi satu abad lalu. Press Release tersebut pada intinya merupakan *political apology* yang ditujukan kepada korban dan keturunan etnis Herero dan etnis Nama di Namibia ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021).

*Political apology* Jerman pada tahun 2021 diwakili oleh Heiko Maas, selaku Menteri Luar Negeri Jerman. Pernyataan resmi tersebut diikuti dengan *wiedergutmachung* (reparasi) sebesar 1.1 milyar euro untuk program pembangunan ([www.auswaertiges-amt.de](http://www.auswaertiges-amt.de), 2021). *Political apology* tersebut disampaikan oleh Heiko Maas pada 28 Mei 2021 melalui Press Release resmi Pemerintah Jerman dan media sosial resmi Heiko Maas ([twitter.com](https://twitter.com)).

Pernyataan *political apology* Jerman pada 2021 berisikan permintaan maaf kepada korban genosida di Namibia, rekognisi terhadap kejahatan genosida di Namibia, tujuan dari pihak Jerman untuk mencapai rekonsiliasi, dan harapan Jerman untuk dapat menciptakan masa depan yang lebih baik—

khususnya dalam lingkup hubungan bilateral antara Jerman dengan Namibia, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada lampiran dua.

Argumen Franziska Boehme (2020) bahwa respons Jerman terhadap genosida di Namibia yang semula terkesan “*unapologetic*” menjadi “*apologetic*” kemudian bertransformasi ke arah positif dengan adanya kebijakan *political apology* Jerman tahun 2021 yang diikuti *wiedergutmachung* (reparasi) yang diberikan kepada Namibia.

Setelah perjalanan panjang Jerman dan Namibia dalam dialog mengenai kasus genosida di Namibia, diikuti dengan *political apology* 2004, pengembalian tengkorak korban genosida, *political apology* 2021 diikuti dengan reparasi yang membuktikan komitmen Jerman untuk benar-benar meminta maaf dan menebus kejahatan genosida di Namibia. Jerman yang semula dianggap enggan untuk meminta maaf dan menanggapi isu genosida di Namibia (Köbler, 2018).

Bersamaan dengan *political apology* 2021 Jerman yang disampaikan melalui pernyataan resmi Heiko Maas, Jerman memberikan reparasi untuk Namibia sebesar 1.1 milyar euro yang akan direalisasikan dalam bentuk bantuan pembangunan, pertanian, infrastruktur desa dan sumber air bersih (www.auswaertiges-amt.de, 2021). Pendaan tersebut bertujuan untuk menyediakan asistensi terhadap pembangunan dan perkembangan masyarakat Namibia, khususnya mereka yang dahulu terdampak oleh genosida Herero dan Nama (Melber, 2022).

*Wiedergutmachung* bertujuan untuk memberi pesan positif pada generasi berikutnya bahwa terdapat cara untuk mengkomunikasikan niat baik meskipun terdapat kejahatan yang sempat terjadi di masa lalu dan pelakunya sudah tidak dapat dihukum dan sejak tahun 2017 pemerintah Jerman semakin intensif untuk menerapkan kebijakan ini (Federal Minister of Finance of Germany, 2021).

Sejauh ini, belum banyak penelitian yang membahas reparasi Jerman tahun 2021 sebab kebijakan tersebut tergolong masih baru. Beberapa penelitian mengenai *political apology* Jerman dari Reinhart Kossler (2015), Christopher Daase, Stefan Engert, Michel-Andre Horelt, Judith Renner, dan Renate Strasser (2015), serta Franziska Boehme (2020) belum mencakup kebijakan terbaru Jerman dalam kasus genosida di Namibia, yaitu *political apology* tahun dan reparasi 2021.

Akan tetapi, Henning Melber (2022) dengan penelitian terbaru berjudul *Germany and Reparations: The Reconciliation Agreement with Namibia* mengkritisi reparasi 2021 Jerman bahwa jumlah dana yang diberikan tidak cukup layak untuk menutup kasus genosida di Namibia (Melber, 2022).